

EKSISTENSI POPULISME PADA PEMILU PRANCIS 2017

Oleh:

**RASMAH RAJAB, LISDA DHYNIARTI BACHTIAR, MEKAR SRIWIJAYANTI
ANNISA NURRAHMASARI, DIAN ASVIRA**

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

Populism is a political rhetoric that is exploited by a few people in a way that attracts sympathy from the people for a specific purpose. The concept of populism developed by theorist Ernesto Laclau can be used in analyzing populism in the 2017 elections in France. The National Front Party (FN) is the only far-right party in France founded by the famous French Populist Jeane Le Pen. The National Front is a party that has an ultrationalist and racist nature, characteristics that are far from contradicting democratic values which characterize the republican government. The figure who has made FN survive until now and even passed the 2017 French elections is none other than Jeane Le Pen's own son, Marie Le Pen. Although Marine Le Pen is seen as a candidate who has no solution to the problems that exist in France, he uses anti-minority, anti-immigrant and anti-EU sentiments in his discussions. Le Pen takes the issue of SARA and points to immigrants, especially Muslims, as the cause of the economic slowdown and relatively high unemployment. Marine Le Pen brings the National Front a much "more moderate" look. Le Pen believes that after the Brexit decision in Britain and Donald Trump's victory in the United States, the wave of populism may be strong enough to propel him to the helm in France.

Keywords: *populism, France, National Front Party*

Abstrak

Populisme merupakan suatu retorika politik yang dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan cara menarik simpati dari rakyat dengan tujuan tertentu. Konsep populisme yang dikembangkan oleh teoritis Post-Marxist Ernesto Laclau dapat digunakan dalam menganalisis populisme dalam pemilu 2017 di Prancis. Partai Front Nasional (FN) merupakan satu-satunya partai ekstrem kanan di Prancis yang didirikan oleh tokoh Populis terkenal Prancis Jeane Le Pen. Front Nasional adalah sebuah partai yang memiliki sifat ultrasionalis dan rasis, sifat-sifat yang jauh bertolak belakang dengan nilai-nilai demokratis yang menjadi salah-satu ciri pemerintahan republic. Tokoh yang membawa FN bertahan hingga saat ini dan bahkan lolos dalam pemilu Prancis 2017 tidak lain adalah anak dari Jeane Le Pen sendiri, Marie Le Pen. Meskipun Marine Le Pen dipandang sebagai kandidat yang tidak punya jalan keluar atas masalah yang ada di Perancis tetapi ia pandai

menggunakan sentimen anti-minoritas, anti terhadap imigran dan anti terhadap EU dalam setiap diskusinya. Le Pen menggunakan isu SARA dan menunjuk para imigran, khususnya umat Muslim, sebagai penyebab dari melambatnya ekonomi dan meningkatnya pengangguran yang relatif tinggi. Marine Le Pen membawa Front National jauh "lebih moderat". Le Pen percaya setelah keputusan Brexit di Inggris dan kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, gelombang populisme mungkin akan cukup kuat untuk mendorong dirinya sampai pada pucuk pimpinan di Prancis.

Kata Kunci: populisme, Prancis, Partai Front Nasional

PENDAHULUAN

Negara-negara Eropa yang merupakan negara pengagas demokrasi saat ini sedang diperhadapkan oleh isu-isu kemunculan tokoh populis yang begitu meresahkan dengan wacana-wacana yang sangat bertentangan dengan image Eropa sebagai negara liberal. Politik populis bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena yang kembali bangkit ke kancah perpolitikan dunia. Kemunculan tokoh politik populis secara global merupakan reaksi atas munculnya ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap institusi sosial dan politik di suatu negara. Adanya ketimpangan keadilan dan kemakmuran yang kemudian melahirkan pemimpin yang menggunakan politik populis sebagai alat untuk mengambil hati masyarakat. Selain itu kemunculan fenomena ini merupakan bentuk kekecewaan pada janji-janji politik liberal, terutama di Barat, dan janji modernisme di negara berkembang.

Jika ditelaah lebih jauh dapat dikatakan politik populis berkaitan erat dengan efek globalisasi neoliberal dan sering kali berbarengan dengan dominasi oligarki yang melahirkan ketidakpercayaan pada kekuatan politik dan organisasinya. Sejak awal kemunculannya hingga saat ini belum ditemukan definisi yang tepat dan baku untuk mengartikan berbagai bentuk populisme itu sendiri. Dari segi bahasa, Populis berasal dari bahasa Latin "Populus:" yang artinya adalah rakyat. Populis sebagai sebuah kebijakan dalam prakteknya adalah kebijakan pemimpin negara mendukung atau berpihak pada rakyatnya dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Populis merupakan kebijakan yang lahir dari pemimpin yang merakyat dan pro rakyat¹. Populisme tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah ideologi dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai posisi dari populisme itu sendiri. Mudde (2004) menyebutnya sebagai ideologi yang mengkontraskan rakyat dengan elite yang korup. Judis (2016) dalam buku *the Populist Explosion* secara singkat

¹ Author. *Apa itu Politik Populisme? Fakta, Sejarah dan Informasi Lainnya*. 21 Mei 2017. Diakses pada <http://www.amazine.co/27981/apa-itu-politik-populisme-fakta-sejarah-informasi-lainnya>

memaknainya sebagai gerakan politik anti-kemapanan terhadap globalisasi, imigrasi dan perdagangan bebas yang disokong oleh rezim berkuasa².

Populisme tidak lain merupakan suatu retorika politik yang dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan cara menarik simpati dari rakyat dengan tujuan tertentu dalam hal ini tidaklain adalah tujuan pencapaian kekuasaan.

Image utama yang coba dibangun oleh tokoh-tokoh populisme adalah bahwa kewajiban pemerintah ialah menyediakan kondisi yang baik dalam artian layak bagi seluruh rakyatnya. Pemimpin bertanggungjawab atas distribusi ekonomi, politik, dan budaya serta kekuasaan yang adil. Adil dalam artian politik dan ekonomi yang tidak berpihak ataupun dikuasai oleh segelintir orang saja. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan seorang pemimpin yang kemudian berperan untuk mengatur nekanisme yang memungkinkan segala kebijakan di arahkan bagi keuntungan rakyat. Weber menjelaskan bahwa ada sebuah relasi yang baik dimana para pemilih mendukung kandidat dengan harapan realisasi atas janji yang diberikan meliputi seluruh kebutuhan sosial masyarakat mulai dari pendidikan gratis, jaminan kesehatan, harga sembako yang terjangkau, pengaturan pajak dan lapangan pekerjaan.

Populisme dalam kamus sosiologi didefinisikan sebagai sebuah retorika politik dengan anggapan bahwa keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat, dimana kelompok-kelompok elit yang dominan dipandang sebagai kelompok korup dan bahwasanya dalam rangka mencapai sasaran-sasaran politik jalan terbaik adalah dengan membangun relasi yang baik antar pemerintah dan rakyat tanpa melalui perantara lembaga-lembaga politik yang ada. Menurut pendapat dari pengamat politik dan ekonomi global, munculnya kembali gerakan-gerakan populisme di tengah dinamika globalisasi yang telah mapan disebabkan adanya ketidak stabilan kondisi domestik akibat menurunnya kesejahteraan rakyat kelas menengah. Hal ini disebabkan karena kegagalan dari elit politik dalam hal ini pemerintah didalam suatu negara menyerap aspirasi dan kebutuhan warga negaranya yang menginginkan pembaharuan dalam konteks politik dan ekonomi negara. Salah satu yang mendorong gerakan populisme muncul itu memang karena faktor ekonomi, ketika suatu negara dihadapkan pada krisis di tengah globalisasi, kepercayaan warga pada elite politik mulai memudar.

Pengamat Intelijen Soeripto J Said mengatakan, rasa tidak puas di masyarakat disebabkan oleh kekecewaan publik (*populer discontent*) terhadap proses demokrasi saat ini yang justru menimbulkan ketimpangan, baik di sektor politik maupun ekonomi. Soeripto menilai, gejala populisme muncul karena sumber daya alam dikuasai oleh korporasi, yang melakukan pendekatan kepada

² M Prayoga Permana. *Mengantisipasi Gelombang Populisme Barat*. 21 Mei 2017. Diakses pada <https://news.detik.com/kolom/d-3447709/mengantisipasi-gelombang-populisme-barat>

pusat pengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Ini menyebabkan kebijakan publik terkesan mementingkan pihak pemodal dan merugikan kepentingan nasional. Bahkan kebijakan publik tersebut dianggap sebagai bentuk baru penjajahan di bidang ekonomi. Kesenjangan sosial memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis. Tokoh populis yang cenderung anti-demokrasi dan anti pluralisme itu dipercaya membawa ide-ide kemakmuran.

Retorika kaum populis pada faktanya selalu mengarah kepada bentuk intoleransi, rasis, dan xenophobia. Hal ini dilakukan untuk melegitimasi tuduhan mereka terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politik mereka. Sebut saja Amerika Serikat misalnya, menangnya Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat membuat isu populisme ini semakin mencuat, bagaimana tidak Amerika Serikat yang selama perjalanannya merupakan negara yang menjunjung tinggi liberalisme dan nilai-nilai demokrasi yang juga diturunkan dari konstitusi negaranya menggegerkan dunia dengan terpilihnya Presiden Donald Trump yang notabeneanya berasal dari kalangan ekstrimisme kiri dengan ideology yang secara terang-terangan melenceng dari nilai-nilai liberal serta demokrasi yang sudah mapan. Dalam kampanyenya, secara terang-terangan Donald Trump menyatakan sikap penolakan terhadap imigran khususnya imigran muslim, tidak hanya itu dalam kebijakannya ia juga mengagendakan pembangunan tembok pembatas di perbatasan Meksiko. Arah politik yang dicanangkan oleh presiden Donald Trump mengarah kepada politik proteksionisme baik itu di bidang ekonominya maupun di bidang sosial.

Tidak hanya di Amerika Serikat, di Eropa politik populis di tandai dengan munculnya partai-partai politik anti Uni Eropa seperti partai Front Nasional di bawah Marine Le Pen di Perancis, United Kingdom Independence Party di Inggris, selain di Spanyol, Finlandia, dan Belanda. Peristiwa Brexit juga merupakan salah satu bentuk dari kebangkitan populisme di perpolitikan dunia. Fenomena ini kembali di Prediksi pada pemilu Perancis 2017, dimana dukungan terhadap politisi sayap kanan Marine Le Pen terus meningkat, sejumlah pihak menganggap fenomena di tiga negara ini menunjukkan penguatan gerakan populisme demokrasi Barat yang bisa berakhir pada penolakan kerjasama dan solidaritas internasional di tengah era globalisasi. Usai kemenangan Trump, Le Pen bahkan merasa semakin percaya diri menyuguhkan visi dan misi partainya yang dikenal sebagai kubu anti islam dan imigran³(Anonim, 2015). Perancis sendiri mendefinisikan populisme sebagai gaya politik yang menjadi sumber perubahan, berdasarkan retorika sistematis untuk menarik perhatian publik.

Dari beberapa referensi yang di jadikan sebagai rujukan telah membahas

³Anonym. (2015). *Era Politik Populis di Asia Tenggara dan Demokrasi*. LIPI. 21 Mei 2017. Diakses pada <http://lipi.go.id/lipimedia/era-politik-populis-di-asia-tenggara-dan-demokrasi/12118>

mengenai populisme dalam beberapa pandangan, diantaranya referensi yang berjudul Menguatnya Populisme : Trump, Brexit hingga FPI yang membahas tentang bagaimana brexit menjadi salah satu dampak populisme, selain itu juga membahas bagaimana populisme di Asia yang mulai merambah ke Indonesia yang mengambil fokus pada populisme islam pada aksi-aksi bela islam yang menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama yang dianggap menistakan agama. Referensi kedua berjudul Merebut Populisme dari Muhammad Ridha yang membahas beberapa perbedaan perspektif dari beberapa kalangan terkait populisme. Sehingga dalam paper ini kemudian mencoba mengangkat pembahasan baru terkait Populisme, oleh karena itu penulis mengangkat masalah tentang bagaimana eksistensi populisme pada pemilu Prancis 2017 yang baru saja berlangsung sebagai salah satu bentuk kebangkitan kembali populisme di Eropa.

KERANGKA TEORI

Konsep Populisme merupakan instrumen penting dalam kebijakan pemimpin negara dalam mendukung atau berpihak pada rakyatnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap apa yang sebaiknya diambil pemimpin suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Dalam tradisi ilmu politik mainstream penilaian negatif terhadap fenomena politik populisme tersebut dapat di maklumi, karena korpus tradisi politik liberal kerap kali menempatkan artikulasi politik populisme sebagai sebuah artikulasi politik massa terbelakang. Anti kemajuan dan cenderung menolak elite politik dan institusi politik demokrasi. Populisme seperti ini dikemukakan sejak lama oleh Isalah berlin dan beberapa ilmuan bahwa terdapat enam karakter yang merangkum seluruh varian dari populisme yaitu : pertama bahwa populisme memiliki komitmen untuk membangun komunitas yang terintegrasi dari masyarakat yang solid dan koheren. Kedua, populisme memiliki karakter apolitis dalam pengertian tidak tertarik dan cenderung membenci institusi politik karena kau populis cenderung mempercayai masyarakat terlebih dahulu sebelum institusi negara. Ketiga, tendensi populisme yang cenderung ingin mengembalikan masyarakat pada kondisi alamiah dan spritual sebelum masyarakat terdistorsi oleh efek modernisme. Keempat, kecenderungan populisme yang ingin kembali pada masa lalu yang. Kelima, kaum popilis selalu memosisikan diri sebagai kelompok mayoritas. Keenam, populisme sering kali muncul dalam masyarakat yang tengah menghadapi transisi menuju era modernisasi.

Konsep populisme yang dikembangkan oleh teoritis Post-Marxist Ernesto Laclau dapat digunakan dalam menganalisis populisme dalam pemilu 2017 di Prancis. Konsepsi Laclau tentang populisme sebenarnya merupakan bentuk modifikasi dan pengembangan dari konsep Hegemoni Antonio Gramsci yang dalam konsepsinya tentang hegemoni Laclau merekonstruksi pemikiran Gramsci

dengan menolak pandangan privileged subject dalam transformasi sosial. sehingga dalam hal ini Laclau kemudian menolak pandangan dalam Marxisme terkait dominan kelas pekerja yang menempati peran sentral sebagai pelopor perubahan sosial dan politik. Sebaliknya peran yang seharusnya di mainkan oleh pekerja kemudian di isi oleh para actor sosial dalam gerakan sosial yang baru.

Selain mengubah alur pemikiran Gramsci, Laclau kemudian memusatkan ide dan pikirannya pada Populisme yang di anggap sebagai suatu istilah yang tidak asing karena Laclau pernah menyaksikan sendiri kebangkitan gerakan peronisme yang begitu populis. Menurut Laclau populisme mengacu pada munculnya gerakan sosial multi kelas dan suprakelas yang hadir ketika kekuasaan rezim politik ekonomi melemah yang kemudian memberikan kesempatan pada gerakan sosial masyarakat yang tersubordinasi untuk melakukan counter hegemony yang mengartikulasikan artikulasi politik bagi kelompok masyarakat yang tersubordinasi. Dalam pemikirannya, Laclau menarik point bahwa manifestasi dari politik populisme tidak selalu termanifestasikan ke dalam politik sosialisme tetapi juga dalam politik ekstrem kanan maupun tengah⁴ (Panizza, 2005)

Tulisan Laclau tentang populisme yang berjudul "populism What is in a name ? yang kemudian di muat dalam buku "populism and The Mirror of Democracy" mengajukan beberapa argument anti mengenai teori populisme yang dikembangkannya. Pertama, Laclau mengatakan bahwa "any social Struggle is a question of demands" dalam hal ini Laclau mengatakan pembentukan gerakan populis berawal adanya tuntutan dari kelompok-kelompok sosial masyarakat yang gagal di serap oleh institusi-institusi pemerintahan. Kedua, ketidakpuasan salah satu actor sosial yang tuntutannya tidak dipenuhi sehingga memicu solidaritas sosial diantara kelompok-kelompok sosial lainnya. Artikulasi dan agresi ini kemudian membentuk apa yang disebut Laclau sebagai rantai keterikatan. Ketiga, keterikatan ini akan membangun situasi antagonisme yang memisahkan posisi politik antara kelompok-kelompok sosial dan rezim penguasa. Kondisi antagonisme ini yang kemudian disebut Laclau sebagai batas Politik. Ketiga situasi antagonism dan terbentuknya rantai keterikatan melahirkan suatu actor sosial yang merepresentasikan tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial lainnya menjadi sebuah tuntutan yang bersifat universal. Dalam hal ini actor sosial yang berfungsi sebagai agen representasi oleh Laclau disebut Empty Signifier yang mampu memaknai perjuangan yang bersifat supra kelas menjadi sebuah perjuangan yang beridentitas⁵ (Arditi, 2010)

PEMBAHASAN

⁴ Panizza, Fransisco. (2005). *Populism and The Mirror of Democracy*. London. Verso. Hlm.33

⁵ Arditi, B. *Populism in Hegemony is Politics? On Ernesto Laclaus "On Populist Reason"*. Constellation. Vol. 17 Issue 3 2010, hal 488-489

Partai Front Nasional (FN) merupakan satu-satunya partai ekstrem kanan di Prancis yang didirikan oleh tokoh Populis terkenal Prancis Jeane Le Pen. Front Nasional adalah sebuah partai yang memiliki sifat ultrasionalis dan rasis, sifat-sifat yang jauh bertolak belakang dengan nilai-nilai demokratis yang menjadi salah-satu ciri pemerintahan republic. FN yang merupakan partai ekstrem kanan ini mempunyai komitmen dalam hal pertahanan bangsa, budaya, dan kedaulatan nasional. Secara moderat, mereka menentang integrasi ekonomi Eropa karena integrasi ekonomi akan menghasilkan kerugian dan memperlemah kontrol ekonomi nasional. Selain itu, partai ini juga sangat menentang integrasi politik Eropa karena integrasi tersebut melemahkan kedaulatan nasional.⁶

Partai ini lahir dan bertahan hingga kini karena perasaan tidak aman dan tidak percaya yang dirasakan oleh sebagian penduduk Prancis dalam menghadapi berbagai permasalahan besar di Prancis seperti masalah pengangguran dan imigran. Dengan mengangkat permasalahan itu FN banyak mendapat dukungan dari penduduk di daerah-daerah pinggiran kota yang sensitif terhadap masalah imigran. FN yang ingin memelihara identitas nasional Prancis, tidak mau menerima keberadaan orang asing, terutama bagi yang datang dari luar Eropa, dengan alasan dapat merusak identitas bangsa Prancis. FN secara terang-terangan menentang adanya persamaan bagi semua individu seperti yang tercantum, dalam La declaration des droits de l'homme et du citoyen karena pengakuan kesamaan tersebut dianggap dapat merusak kemurnian Prancis. Di tengah-tengah sikap sebagian besar masyarakat Prancis yang justru mengakui hak-hak orang lain dan tidak menyukai perbedaan perlakuan berdasarkan ras, FN justru lahir dan masih tetap bertahan hingga sekarang dan bahkan telah menunjukkan eksistensinya dengan masuk pada pemilu Prancis 2017⁷.

Tokoh yang membawa FN bertahan hingga saat ini dan bahkan lolos dalam pemilu Prancis 2017 tidak lain adalah anak dari Jeane Le Pen sendiri. Marie Le Pen. Tidak hanya lolos dalam pemilu, FN menjadi partai besar yang diperhitungkan serta digadang-gadang akan memenangkan suara di putaran pertama pada pemilu Prancis yang lalu, meskipun hal tersebut pada kenyataannya tidak terjadi. Marie Le Pen kalah pada saat putaran pertama dan kedua. Dengan demikian pemilu Prancis dimenangkan oleh Partai Republik. Namun hal ini tidak serta merta membuat Prancis terbebas dari ancaman Populisme. Populisme menjadi seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan menghancurkan system demokrasi liberal yang telah mapan. Ini bisa di lihat melalui selisih perolehan suara pada pemilu Prancis beberapa saat yang lalu yang hanya

⁶ Nur Laeli. *Kemenangan Front Nasional Dalam Pemilu Parlemen Prancis Tahun 2014*. 21 Mei 2017. Di akses pada <http://www.lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-4/20404822-MK-Nur%20Laeli.pdf>

⁷ Diah Sumanti. *Front Nasional dalam Politik Prancis*. 21 Mei 2017 diakses pada <https://www.lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20158504.pdf>

berbeda beberapa persen saja. Hal ini mengindikasikan adanya kelompok-kelompok masyarakat Prancis yang tetap pro dan mendukung partai ekstrem kanan. Dalam artian didalam internal masyarakat Prancis sendiri telah muncul suara-suara penolakan terhadap system global yang telah mapan saat ini. Dan suara-suara tersebut dapat diafirmasi oleh partai-partai ekstrem kanan seperti Front Nasional dengan kembali menyuarakan gerakan-gerakan populis anti globalisasi, anti integrasi dan anti imigrasi.

Pada pemilu Prancis yang lalu, peta kandidat Prancis menunjukkan ada empat kandidat yang paling kuat, jajak pendapat menunjukkan Emmanuel Macron yang pro-Eropa menjadi favorit, namun tidak memiliki partai yang kuat, tiga saingan dekatnya adalah pemimpin Front Nasional (FN) anti imigrasi, Marine Le Pen yang akan membuang mata uang euro dan menghidupkan kembali *Franc*, kandidat lain dari sayap kiri yaitu Jean-Luc Melenchon yang Prancis merobohkan perjanjian perdagangan internasional dan keluar dari NATO, sementara Kandidat Prancis Francois Fillom dianggap sangat konservatif dan sering di terpa isu nepotisme(Suryadi, 2017)

Dalam sejumlah pendapat memperkirakan Le Pen akan memenangkan pemilu Prancis di putaran pertama meski di putaran kedua masih harus bersaing ketat dengan calon lainnya dari partai Sosialis, Emmanuel Macron. Sejak memimpin partai Front Nasional, Le Pen terus menyuarakan penentangan terhadap imigran dan anti Uni Eropa. Demi menarik perhatian rakyat Le Pen menggunakan slogan "In The Name of People" sebagai bukti pengabdianya pada rakyat, selain itu dalam kampanyenya Le Pen berjanji jika terpilih akan membawa Prancis mengikuti jejak Inggris melakukan Brexit dan membuat aliansi baru melawan Uni Eropa dan mengikuti jejak Trump terkait kebijakan pelarangan imigran. Dalam memimpin Prancis Le Pen percaya bahwa hanya dengan politik isolasionisme dan nasionalisme ekonomi dapat melindungi Prancis dari dua kejahatan yang di sebutnya sebagai "Anglo Saxon Multikulturalisme" dan liberalisme politik.

Di awal karirnya di dunia politik, Marine Le Pen adalah nama yang mungkin tidak diperhitungkan sebagai calon pemimpin di Prancis sebelumnya. Tapi perjalanan waktu kemudian membuktikan popularitas dan elektabilitas Le Pen semakin menguat. Le Pen dalam sejumlah jajak pendapat di Prancis diperkirakanj memenangkan pemilu Prancis di putaran pertama (April 2017) meski di putaran kedua (Mei 2017) meki harus bersaing ketat dengan calon lainnya dari partai sosialis, Emmanuel Macron. Nama Le Pen tidak terlalu banyak dikenal orang saat ayahnya Jean Le Pen menjadi politisi besar di Prancis, sebagai pendiri partai FN pada 5 Oktober 1972. Pada tahun 1998 dia pun kemudian

berperan sebagai pensihat hukum bagi sang ayah. Setelah itu, karir Le Pen di politik mulai nampak ke permukaan, dia terpilih sebagai anggota dewan daerah (1998-sekarang), anggota Parlemen Eropa (2004-sekarang), dan anggota dewan kota di Henin-Beaumont (2008-2011). Pada tahun 2012, Le Pen berada pada posisi ketiga pada pemilihan presiden dengan meraih 17.90% suara, di bawah Francois Hollande dan Nicolas Sarkozy. Kini Le Pen mencalonkan kembali dalam pemilu presiden Prancis 2017. Di bawah bayang-bayang kebesaran nama sang ayah Le Pen cenderung tidak diperhitungkan di kancah politik Prancis. Tapi saat ini, Le Pen bukan lagi sekedar “anak bawang”. Dia sekarang memimpin partai yang didirikan sang ayah, sekaligus menjadi kandidat kuat calon presiden Prancis dari Partai FN.

Meskipun Marine Le Pen dipandang sebagai kandidat yang tidak punya jalan keluar atas masalah yang ada di Prancis tetapi ia pandai menggunakan sentimen anti-minoritas, anti terhadap imigran dan anti terhadap EU dalam setiap diskusinya. Le Pen menggunakan isu SARA dan menunjuk para imigran, khususnya umat Muslim, sebagai penyebab dari melambatnya ekonomi dan meningkatnya pengangguran yang relatif tinggi. Provokasi semacam itu sulit dibendung karena dalam beberapa tahun terakhir ini Prancis memang diserang oleh aksi teroris yang berafiliasi kepada ISIS. Di tahun 2011 Marie Le Pen mengukudeta ayahnya sendiri, Jean Le Pen. Hal ini dikarenakan Marine Le Pen tidak menyukai sikap ayahnya yang sangat provokatif, intoleran dan tidak diplomatis dan dianggap membuat suara partai tidak tumbuh.⁸

Oleh sebab itu ia menyingkirkan ayahnya dan tampil sebagai pemimpin partai di Front National yang baru. Tindakan politik tersebut tepat dan menguntungkan bagi Front National. Marine Le Pen membawa Front National jauh “lebih moderat” dalam ukuran sayap kanan sehingga dapat menghimpun para pemilih yang tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Jean Le Pen. Marine melakukan pembenahan di dalam partai. Ia mengurangi figur-figur yang dianggap sebagai tokoh sayap kanan ekstrem, *bigot*, pendukung NAZI atau anti-Yahudi. Ia melakukan strukturisasi partai dengan mengisi kepengurusan dengan orang-orang yang lebih muda, modern, berpendidikan dan santun. Ia bahkan memilih Florian Phillipot sebagai wakilnya yang berusia 31 tahun dan baru tamat dari perguruan tinggi elit *Ecole Nationale d'Administration*. Perubahan ini terutama untuk menyasar pemilih muda dari sayap Kiri dan Kanan.

Strategi untuk membawa Front National lebih “moderat” tidak berarti mengurangi garis politik partai yang sangat populis dan Kanan ini. Secara politik, kebijakan Front National adalah menolak keanggotaan Prancis dalam Masyarakat Uni Eropa (EU), menolak Eurozone, menolak *Schengen Area*,

⁸ Wisnu, Dinna. (2017). *Le Pen dan Bumerang Politik SARA di Prancis*. SindoNews. 21 Mei 2017. Diakses pada <https://nasional.sindonews.com/read/1201940/18/le-pen-dan-bumerang-politik-sara-di-prancis>

pendekatan yang keras terhadap pelanggaran hukum dan penolakan terhadap kebebasan bergerak bagi pendatang baik yang berasal dari negara-negara anggota EU dan khususnya pendatang di luar EU. Marine hanya mencoba untuk mengimbangi garis politiknya populis Kanan tetapi berusaha untuk mencitrakan partainya sebagai partai yang peduli dengan kelompok masyarakat lain, modern dan progresif.

Le Pen percaya bahwa hanya dengan politik “isolasionisme” dan “nasionalisme ekonomi” dapat melindungi Prancis dari dua kejahatan yang disebut sebagai “Anglo-Saxon multikulturalisme” dan liberalism politik. Le Pen mendukung Prancis kembali pada mata uang *Franc*. Dia juga berjanji akan melakukan referendum rakyat ala Brexit jika nanti terpilih sebagai presiden. Selain itu dia juga mendukung penarikan Prancis dari NATO. Dalam sejumlah isu, posisi Le Pen memang seperti cermin dari presiden AS Donald Trump. Le Pen percaya setelah keputusan Brexit di Inggris dan kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, gelombang populisme mungkin akan cukup kuat untuk mendorong dirinya sampai pada pucuk pimpinan di Prancis.

Meskipun kalah dalam pemilu Prancis, tetapi Marie Le Pen telah membuktikan elaktabilitasnya sebagai seorang figur politik yang diperhitungkan di Prancis. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan suara Marie Le Pen dengan kandidat terpilih Emmanuel Macron pada putaran pertama yang hanya berbeda 2,22% saja. Marine Le Pen memperoleh suara sebesar 21,53% sedangkan Macron memperoleh suara 23,75%.⁹Selain itu lolosnya Marie Le Pen dengan partai Front Nasionalnya ke dalam putaran kedua pemilu Prancis juga menjadi indikasi keberhasilan tersendiri bagi Marie Le Pen. Fakta-fakta ini kemudian tidak dapat memungkiri eksistensi dari Populisme pada pemilu Prancis 2017. Kemenangan Marine dan juga Macron dalam Pilpres Prancis 2017 ini juga telah menjadi catatan sejarah penting di Prancis. Dalam Pilpres tahun ini mereka telah mengalahkan dua partai besar dan mapan yang selalu ada dalam sejarah pemilu yaitu Partai Sosialis dan Partai Konservatif (Union pour un Mouvement Populaire-UMP). Kekalahan yang dialami oleh Marine Le Pen ini sendiri dikarenakan Front Nasional sendiri memiliki citra buruk, terutama di kalangan warga imigran dan Yahudi. Hal itu disebabkan garis politik partai yang anti terhadap kaum imigran dan pernyataan di masa lalu yang kontroversial terkait tragedi Holocaust.

Meskipun pada akhirnya, hasil dari pemilu Prancis 2017 memenangkan Macron dari partai sosialis yang pro terhadap Uni Eropa, namun pergolakan

⁹ **Vetriciawizach. (2017).** *Hasil Pemilu Perancis: Le Pen dan Macron ke Putaran Dua.* CNN Indonesia. 19 Mei 2017. Diakses pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170424102223-134-209691/hasil-pemilu-perancis-le-pen-dan-macron-ke-putaran-dua/>

politik populisme tidak akan berhenti di situ saja. Untuk mencegah hal tersebut, secepat mungkin pemerintah harus memikirkan ide-ide solutif untuk meredam pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam system global. Karena tidak dapat dipungkiri fakta bahwa kemunculan dari para tokoh populis tidak lain disebabkan karena adanya peluang dari mereka yang merasa dirugikan dalam system global yang mapan sebagaimana yang berlangsung saat ini. Stagnasi perekonomian di Eropa secepat mungkin harus diselesaikan untuk menutup keran gerakan populis saat ini.

REFERENSI

- Anonim. (2015). *Era politik Populis di Asia Tenggara dan Demokrasi*. LIPI.
- Author. (2016). *Apa itu Politik Populisme? Fakta, Sejarah dan Informasi Lainnya*. 21 Mei 2017. Diakses pada <http://www.amazine.co/27981/apa-itu-politik-populisme-fakta-sejarah-informasi-lainnya>
- Arditi, B. (2010). *Populism is Hegemony in Politics ? On Ernesto Laclau's "On Populist Reason"*.
- Diah Sumanti. (2015). *Front Nasional dalam Politik Prancis*. 21 Mei 2017 diakses pada <https://www.lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20158504.pdf>
- M Prayoga Permana. (2017). *Mengantisipasi Gelombang Populisme Barat*. 21 Mei 2017. Diakses pada <https://news.detik.com/kolom/d-3447709/mengantisipasi-gelombang-populisme-barat>
- Nur Laeli. *Kemenangan Front Nasional Dalam Pemilu Parlemen Prancis Tahun 2014*. 21 Mei 2017. (2016). Di akses pada <http://www.lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-4/20404822-MK-Nur%20Laeli.pdf>
- Panizza, F. (2005). *populism and The Mirror of Democracy*. London: Verso.
- Suryadi. (2017). *Pemilihan Presiden Prancis dalam Bayang-Bayang Populisme*. IndeksBerita.
- Wisnu, Dinna. (2017). *Le Pen dan Bumerang Politik SARA di Prancis*. SindoNews. 21 Mei 2017. Diakses pada <https://nasional.sindonews.com/read/1201940/18/le-pen-dan-bumerang-politik-sara-di-prancis>
- Vetriciawizach. (2017). *Hasil Pemilu Perancis: Le Pen dan Macron ke Putaran Dua*. CNN Indonesia. 19 Mei 2017. Diakses pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170424102223-134-209691/hasil-pemilu-perancis-le-pen-dan-macron-ke-putaran-dua/>

